

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS SIAMANG (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)

Oleh

YOHANES PUTRA PARLINDUNGAN SORMIN

Perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan tindak pidana yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem alam serta populasi dari satwa yang dilindungi tersebut. Salah satu contoh kasus nyata terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang membahas mengenai perniagaan satu ekor Siamang (*Symphalangus syndactylus*) untuk melalui *platform* media sosial *Facebook*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat menjelaskan.

Hasil penelitian pada Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda pidana sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Terkait pertimbangan Hakim pada putusan tersebut berdasarkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang berkeadilan karena memenuhi ketiga unsur tersebut

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF PROTECTED
WILDLIFE TRAFFICKING
SIAMANG TYPES
(Study Decision Number: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)**

By

YOHANES PUTRA PARLINDUNGAN SORMIN

*Illegal trade in protected wildlife is a criminal offense that can threaten the balance of natural ecosystems and the population of these protected animals. One example of a real case occurred in the jurisdiction of the Kalianda District Court, which discussed the business of one Siamang (*Symphalangus syndactylus*) through the social media platform Facebook. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator and the judge's legal considerations in Decision Number: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla.*

The research method used is normative legal research that uses 3 (three) types of problem approaches including the legislative approach, the case approach, and also the concept approach. The data sources used in this study are sourced from secondary data consisting of 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which will be analyzed qualitatively using explanatory sentences.

The results of the research on Decision Number: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla show that the perpetrator has the ability to be responsible, there is a mistake, and there is no reason for criminal elimination so that he can be held criminally responsible in the form of imposition of imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months and a criminal fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). Regarding the Judge's consideration of the decision based on juridical, sociological, and philosophical elements, it shows that the decision is a fair decision because it fulfills these three elements.

Keywords: Criminal liability, trade in protected wildlife, judge's consideration.